

Implementasi Sistem Zonasi Sebagai Upaya Pemerataan Peserta Didik Baru Pada SMP Negeri 01 Sekadau Hilir Dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

Fran Dawal¹

¹⁾ *Master's Program in Publik Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak*

Email: frandawal9@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 Desember 2025]

Revised [13 April 2026]

Accepted [15 April 2026]

KEYWORDS

Policy Implementation, Zoning System, PPDB, Educational Equity.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Sistem Zonasi Sebagai Upaya Pemerataan Peserta Didik Baru pada SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 berdasarkan teori George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi serta menilai kontribusinya terhadap pemerataan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir lebih efektif melalui kombinasi media daring dan luring, sedangkan SMP Negeri 10 mengandalkan tatap muka, sumber daya di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir relatif lengkap, sementara SMP Negeri 10 Sekadau Hilir masih terbatas, disposisi pelaksana di kedua sekolah positif dengan strategi berbeda, struktur birokrasi didukung oleh SK Zonasi dan SK Panitia PPDB. Capaian PPDB memperlihatkan SMP Negeri 1 Sekadau Hilir mampu memenuhi kuota 320 siswa dengan mayoritas jalur zonasi, sedangkan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir hanya menerima 64 siswa (2 rombel) seluruhnya melalui zonasi. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan zonasi telah dijalankan sesuai regulasi, namun pemerataan pendidikan belum optimal akibat disparitas sumber daya dan aksesibilitas.

ABSTRACT

This study, titled "Implementation of the Zoning System as an Effort to Promote Equity in New Student Admissions at SMP Negeri 1 Sekadau Hilir and SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, Sekadau Regency," aims to analyze the implementation of the 2024/2025 PPDB (New Student Admissions) zoning system based on George C. Edwards III's policy implementation model—which encompasses communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure—and to evaluate its contribution to promoting educational equity. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, using interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that communication at SMP Negeri 1 Sekadau Hilir was more effective due to the use of both online and offline communication channels, whereas SMP Negeri 10 Sekadau Hilir relied primarily on face-to-face interactions. Resources at SMP Negeri 1 Sekadau Hilir were relatively sufficient, while those at SMP Negeri 10 remained limited. The implementers in both schools demonstrated positive dispositions, although they applied different strategies in carrying out the policy. The bureaucratic structure in both institutions was supported by the Zoning Decree (SK Zonasi) and the PPDB Committee Decree (SK Panitia PPDB), which provided formal guidance for the implementation process. The PPDB outcomes show that SMP Negeri 1 Sekadau Hilir successfully fulfilled its quota of 320 students, with the majority admitted through the zoning pathway. In contrast, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir admitted only 64 students (two classes), all of whom were accepted through the zoning pathway. These findings confirm that the zoning policy has been implemented in accordance with existing regulations; however, educational equity has not been fully achieved due to disparities in resources and accessibility between the two schools.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan 20% anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di seluruh daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan dapat diakses seluruh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi tahapan awal yang menentukan pemerataan akses pendidikan. Pemerintah kemudian menerapkan sistem zonasi sebagai salah satu kebijakan strategis untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses sekolah di sekitar lingkungan mereka. Melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, pemerintah mengatur pelaksanaan PPDB pada setiap jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah

Pertama (SMP). Dalam regulasi tersebut, jalur zonasi menjadi jalur utama dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 50% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam zona yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Sekadau, pelaksanaan sistem zonasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau Nomor 88 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir berada dalam zona yang sama, yaitu wilayah Kelurahan Sungai Ringin. Dengan demikian, kedua sekolah memiliki kedudukan yang setara sebagai tujuan pendaftaran peserta didik baru bagi masyarakat dalam zona tersebut.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam jumlah pendaftar antara kedua sekolah tersebut. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir tetap menjadi pilihan utama masyarakat setiap tahun ajaran, meskipun kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut mengalami kerusakan fisik cukup berat pada sebagian bangunan ruang kelas. Sebaliknya, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir yang memiliki fasilitas lebih layak dan struktur gedung yang permanen justru kurang diminati. Perbedaan minat ini terasa ironis, mengingat jarak kedua sekolah hanya sekitar 4,7 kilometer dan dapat ditempuh kurang dari sepuluh menit. Fenomena ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sekolah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat pemerataan yang diharapkan dari kebijakan zonasi. Masyarakat tampaknya masih terikat pada citra historis sekolah tertentu sebagai sekolah favorit, sehingga preferensi mereka tidak selalu mempertimbangkan kondisi objektif fasilitas sekolah saat ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan distribusi peserta didik baru antarsekolah, padahal kedua sekolah berada dalam zona yang sama dan memiliki akses yang setara.

Ketimpangan ini juga menimbulkan dampak manajerial pada satuan pendidikan. SMP Negeri 1 mendapati dirinya berada dalam tekanan kelebihan peserta didik yang berpotensi berpengaruh pada kenyamanan proses pembelajaran. Sementara itu, SMP Negeri 10 menghadapi tantangan kekurangan peserta didik yang dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran, efisiensi operasional sekolah, dan motivasi tenaga pendidik. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas antar sekolah dan menghambat tujuan pemerataan mutu pendidikan.

Selain itu, upaya-upaya internal yang telah dilakukan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, seperti sosialisasi PPDB ke masyarakat, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, serta publikasi prestasi sekolah, belum mampu meningkatkan minat pendaftar secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan, pelaksanaan, dan kenyataan sosial masyarakat. Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang mampu menggambarkan implementasi kebijakan sistem zonasi secara faktual pada dua sekolah dalam zona yang sama tetapi memiliki preferensi masyarakat yang sangat berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab ketimpangan tersebut, memahami dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, serta memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan peserta didik baru di wilayah Sekadau Hilir.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan zonasi dan menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran yang bermanfaat bagi sekolah sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan daya tarik sekolah di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan tata kelola pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Kajian teori menjadi pilar penting dalam memahami dinamika implementasi kebijakan sistem zonasi pada dua sekolah dalam satu wilayah penerimaan, yaitu SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir. Bab ini menguraikan kerangka konseptual, teori-teori pendukung, penelitian terdahulu, dan logika berpikir penelitian yang menjadi pijakan analitis dalam mengevaluasi kesenjangan distribusi peserta didik baru di antara kedua sekolah tersebut. Fenomena ketimpangan jumlah pendaftar pada dua sekolah yang berada di dalam zona yang sama menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi tidak otomatis menghasilkan pemerataan akses. Hal ini memperlihatkan adanya persoalan pada tahap pelaksanaan kebijakan, bukan pada regulasinya. Implementasi kebijakan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat administratif, teknis, maupun sosial. Karena itu, penelitian ini menempatkan pemahaman tentang proses implementasi sebagai fondasi teoretis utama untuk menjelaskan fenomena tersebut. Kerangka konsep penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan aktor pelaksana dalam mengubah instruksi kebijakan menjadi tindakan nyata. Instruksi dalam bentuk regulasi hanya berfungsi sebagai pedoman, sedangkan keberhasilan pada

tingkat operasional dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami, dikelola, dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan di lapangan. Untuk menganalisis proses tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analitis utama. Model Edwards III dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif namun operasional untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam teori Edwards III, keberhasilan implementasi dipandang bergantung pada empat dimensi utama. Pertama, komunikasi, yang mencakup kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Komunikasi yang tidak merata atau tidak konsisten dapat menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan. Kedua, sumber daya, yang meliputi sarana-prasarana sekolah, tenaga pendidik, dukungan anggaran, serta kapasitas administratif yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Ketiga, disposisi pelaksana, yaitu sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan yang akan sangat menentukan keseriusan pelaksanaan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi, yang merujuk pada mekanisme organisasi, prosedur kerja, serta tata kelola implementasi yang dapat mempercepat atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan.

Selain teori utama Edwards III, penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan Van Meter dan Van Horn serta gagasan dari Grindle. Kedua teori tersebut memperkuat pemahaman bahwa implementasi bukan proses linear, tetapi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, karakteristik pelaksana, hingga kepentingan politik yang menyertai kebijakan. Meskipun demikian, teori Edwards III tetap menjadi fokus utama karena sifatnya yang praktis, sistematis, dan relevan untuk dianalisis pada konteks kebijakan pendidikan tingkat daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pola yang hampir serupa dengan konteks Sekadau Hilir. Beberapa studi menemukan bahwa zonasi sering kali belum mampu menghilangkan persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit, sehingga sekolah tertentu tetap menjadi magnet bagi peserta didik meskipun tidak memiliki fasilitas paling lengkap. Di sisi lain, sekolah yang secara fisik lebih baik justru kurang diminati ketika citra publiknya belum terbentuk secara kuat. Kajian relevan tersebut memperlihatkan bahwa zonasi tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan manajemen pendidikan, komunikasi kebijakan, dan pemerataan sumber daya antar sekolah. Alur pikir penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara realitas ketimpangan jumlah peserta didik baru dan faktor-faktor yang dijelaskan dalam teori Edwards III. Penelitian ini mengkaji bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah; bagaimana sumber daya dikelola dan dimanfaatkan; bagaimana sikap para pelaksana memengaruhi jalannya kebijakan; serta bagaimana struktur birokrasi memandu proses PPDB dalam kerangka zonasi. Diagram alur pikir tersebut menuntun penelitian dalam menghubungkan fenomena di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

Secara keseluruhan, landasan teori ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan zonasi. Dengan memadukan teori utama Edwards III, dukungan dari teori implementasi lainnya, serta temuan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki dasar akademik yang kuat untuk menjelaskan mengapa dua sekolah dalam zona yang sama dapat menunjukkan hasil implementasi kebijakan yang sangat berbeda. Bab ini sekaligus menjadi dasar analitis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi di Sekadau Hilir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan rancangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menelaah implementasi kebijakan sistem zonasi pada dua sekolah negeri yang berada dalam satu wilayah PPDB di Kecamatan Sekadau Hilir. Pemilihan pendekatan ini dilandasi kebutuhan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam melalui penelusuran makna, pengalaman, serta dinamika interaksi antarpelaksana kebijakan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Perspektif kualitatif memungkinkan peneliti menangkap realitas kebijakan sebagaimana dipraktikkan di lapangan, termasuk ketidaksihinggaannya dengan tujuan normatif kebijakan.

Metodologi penelitian dirancang untuk menjawab fokus kajian terkait efektivitas implementasi kebijakan zonasi berdasarkan empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan memosisikan kebijakan sebagai praktik sosial, metode penelitian diarahkan untuk memetakan kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal sekolah membentuk ketimpangan jumlah peserta didik baru antara SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni 2025, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan, hingga pelaksanaan ujian tesis. Durasi tersebut memberikan ruang memadai bagi peneliti untuk membangun interaksi yang intensif

dengan sekolah dan pemangku kepentingan, terutama karena proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aktor yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga berada dalam konteks sosial dan struktural yang berbeda. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan adanya ketimpangan signifikan dalam jumlah peserta didik baru meskipun kedua sekolah berada di zona yang sama berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau Nomor 88 Tahun 2024. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir yang berlokasi di pusat kota cenderung menjadi pilihan utama masyarakat, sedangkan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir yang terletak di daerah pinggiran relatif kurang diminati walaupun memiliki fasilitas fisik yang lebih representatif. Keadaan ini menjadi konteks empiris yang relevan untuk menilai apakah variabel-variabel implementasi dalam model Edwards III benar-benar bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam pendekatan kualitatif, penentuan subjek penelitian ditetapkan secara purposif berdasarkan relevansi peran informan terhadap implementasi zonasi. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah dari kedua satuan pendidikan, anggota panitia PPDB, orang tua yang terlibat dalam proses pendaftaran, peserta didik yang mendaftar pada Tahun Ajaran 2024/2025, serta Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau. Para subjek tersebut dipilih karena keterlibatannya yang langsung dan strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan zonasi. Perspektif beragam yang dihasilkan dari tiap kelompok informan memungkinkan analisis yang triangulatif dan lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan.

Objek penelitian berfokus pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di kedua sekolah tersebut. Objek ini mencakup proses administratif, pemaknaan kebijakan oleh pelaksana, kesiapan sumber daya, serta interaksi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dalam menjalankan PPDB berbasis zonasi. Implementasi diperiksa dalam konteks regulasi nasional, yakni Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, serta kebijakan daerah yang menjadi dasar zonasi. Melalui objek ini, penelitian mengkaji sejauh mana kebijakan mampu mewujudkan prinsip pemerataan akses pendidikan sebagaimana diamanatkan regulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur diterapkan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan evaluasi para informan terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap fenomena yang tidak selalu tercatat dalam dokumen administratif, termasuk interaksi pelaksana, dinamika pendaftaran, dan kondisi lingkungan sekolah. Dokumentasi kebijakan, arsip PPDB, serta dokumen zonasi daerah digunakan sebagai pembanding untuk menilai koherensi antara peraturan dan pelaksanaan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta melakukan member check kepada informan. Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan memastikan bahwa data yang diperoleh bukan hanya representasi sesaat, tetapi mencerminkan pola yang stabil dalam praktik implementasi kebijakan. Ketekunan pengamatan memperkuat proses identifikasi pola perilaku dan interaksi yang berulang, sehingga analisis tidak bergantung pada satu sumber semata.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyusun data berdasarkan kategori tematik yang relevan dengan variabel Edwards III. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan penafsiran hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan data empiris yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan zonasi di Kabupaten Sekadau, sekaligus memberikan kontribusi analitis terhadap upaya memperbaiki pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan publik berbasis zonasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komunikasi Kebijakan

Implementasi Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedua sekolah telah melaksanakan komunikasi kebijakan PPDB melalui berbagai media, namun efektivitasnya berbeda karena perbedaan konteks sosial dan geografis. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir menggunakan saluran komunikasi yang lebih beragam, mulai dari rapat orang tua, publikasi digital melalui media sosial, hingga pemasangan spanduk di area strategis kota. Cara ini membuat informasi PPDB relatif cepat tersebar dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sebaliknya, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir mengandalkan komunikasi berbasis tatap muka dan pendekatan komunitas. Pendekatan ini dilakukan karena sebagian masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi digital. Panitia PPDB terlibat aktif

menjelaskan alur pendaftaran kepada orang tua yang datang langsung, bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dalam zona penerimaan. Perbedaan pola komunikasi ini memengaruhi persepsi dan tingkat keterjangkauan informasi bagi masyarakat. Lokasi SMP Negeri 1 yang berada di pusat kota membuat sosialisasi digital lebih efektif, sementara lokasi SMP Negeri 10 yang lebih terpencil menuntut model komunikasi langsung yang lebih intensif. Meskipun demikian, kedua sekolah sama-sama telah menjalankan prinsip dasar komunikasi kebijakan: kejelasan informasi, kesesuaian pesan dengan regulasi, dan keterjangkauan sasaran. Temuan ini konsisten dengan asumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara pelaksana dan kelompok sasaran. Semakin efektif komunikasi dilakukan, semakin besar peluang kebijakan dipahami dan dilaksanakan sesuai tujuan.

Sumber Daya

Analisis sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan dukungan anggaran. Ketiganya memiliki korelasi langsung dengan kemampuan sekolah menjalankan kebijakan zonasi secara efektif. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir memiliki jumlah panitia PPDB lebih besar dibanding SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, sejalan dengan volume pendaftar yang lebih tinggi. Kompetensi panitia dinilai memadai dan distribusi tugas berjalan dengan baik. SMP Negeri 10 juga memiliki panitia yang bekerja optimal, namun jumlah personalnya lebih terbatas dan sebagian memegang fungsi ganda, sehingga beban kerja lebih berat. Pada aspek fasilitas fisik, SMP Negeri 1 memiliki sarana-prasarana yang lebih lengkap: ruang kelas memadai, laboratorium IPA, perpustakaan, ruang guru, serta fasilitas olahraga. Sementara itu, SMP Negeri 10 masih menghadapi keterbatasan terutama pada fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer dan sarana olahraga. Dari sisi anggaran, SMP Negeri 1 menerima alokasi BOS lebih besar karena jumlah siswanya yang lebih banyak. Hal ini mempermudah pemeliharaan fasilitas secara rutin. SMP Negeri 10, dengan jumlah siswa lebih sedikit, memiliki ruang fiskal lebih terbatas sehingga pembaruan sarana berjalan lebih lambat. Perbedaan ketersediaan sumber daya ini berpengaruh langsung terhadap daya dukung sekolah dalam implementasi PPDB dan secara tidak langsung memengaruhi minat masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sumber daya merupakan penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan zonasi memperlihatkan pola yang positif di kedua sekolah. Kepala sekolah, guru, dan panitia PPDB menampilkan komitmen tinggi untuk menjalankan kebijakan secara transparan dan adil. Kepala SMP Negeri 1 Sekadau Hilir menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, termasuk memberikan penjelasan langsung kepada orang tua yang masih bingung mengenai prosedur zonasi. Panitia juga menunjukkan dedikasi tinggi dengan membuka layanan hingga sore hari apabila dibutuhkan. Di SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, komitmen pelaksana terlihat dari kesediaan mereka melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa dalam zona penerimaan, meskipun akses jalan cukup menantang. Panitia juga menerapkan fleksibilitas dalam pelayanan untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak dapat datang sesuai jadwal. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau turut memberikan pengawasan dan arahan yang memperkuat disposisi pelaksana di tingkat sekolah. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan PPDB selaras dengan asas pemerataan akses pendidikan. Disposisi pelaksana yang positif menjadi faktor penting karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh sikap pelaksana yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen penting yang memastikan keberlangsungan implementasi kebijakan. Pada tingkat kabupaten, SK Zonasi PPDB menjadi dasar formal dalam menentukan wilayah penerimaan masing-masing sekolah. Dokumen ini mengikat secara administratif dan berfungsi sebagai pedoman operasional bagi sekolah. Pada tingkat sekolah, struktur panitia PPDB diatur melalui SK Kepala Sekolah. SMP Negeri 1 memiliki struktur yang lebih besar dan terorganisasi dalam unit-unit fungsional, sementara SMP Negeri 10 menerapkan struktur yang lebih ramping namun fleksibel. Kedua struktur tersebut berfungsi memastikan bahwa proses pendaftaran, verifikasi, dan pelayanan berjalan dengan jelas dan terkoordinasi. Struktur birokrasi yang jelas membantu mengurangi tumpang tindih tugas dan memperkuat alur komunikasi internal. Dengan demikian, implementasi kebijakan berlangsung lebih tertib dan terarah.

Hambatan Implementasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan zonasi PPDB. Pertama, hambatan aksesibilitas fisik. SMP Negeri 10 memiliki akses jalan yang jauh lebih sulit dibanding SMP Negeri 1. Pada musim hujan, akses menuju sekolah sering terhambat sehingga berdampak pada minat pendaftaran dan partisipasi masyarakat. Kedua, hambatan sumber daya teknologi. SMP Negeri 10 menghadapi keterbatasan perangkat dan konektivitas internet sehingga pendaftaran online sulit diakses oleh sebagian masyarakat. Meskipun layanan offline disediakan, proses menjadi lebih lambat. Ketiga, hambatan pemahaman masyarakat. Sebagian orang tua tetap mencoba mendaftarkan anak mereka di sekolah di luar zona dengan berbagai alasan sehingga panitia perlu melakukan klarifikasi secara berulang. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zonasi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial, geografis, dan teknologis masyarakat. Implementasi kebijakan memerlukan pendekatan adaptif yang memperhitungkan karakteristik lingkungan sekitar.

Pembahasan

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan fondasi awal implementasi PPDB karena keberhasilan kebijakan banyak ditentukan oleh bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat. Di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir, komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, platform informasi daring, dan penyampaian pesan secara visual melalui spanduk yang ditempatkan di lokasi strategis. Pola ini efektif karena masyarakat perkotaan cenderung memiliki akses internet dan literasi digital yang memadai. Berbeda dengan itu, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir memilih pendekatan komunikasi berbasis komunitas, seperti sosialisasi langsung ke desa-desa dan koordinasi dengan aparat desa untuk menjangkau orang tua yang kesulitan mengakses informasi digital. Strategi komunikasi yang berbeda di kedua sekolah ini sejalan dengan temuan Rahmawati et al. (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian media penyampaian dengan karakteristik masyarakat. Meskipun kedua sekolah telah berupaya menyampaikan informasi secara jelas, kesenjangan akses digital membuat penerimaan informasi tidak merata. Hal ini juga mempertegas pandangan Edwards III bahwa komunikasi harus tidak hanya jelas, tetapi juga konsisten dan dapat diakses oleh seluruh sasaran kebijakan.

Sumber Daya

Perbedaan fasilitas pendidikan menjadi faktor yang paling nyata dalam membedakan daya tarik kedua sekolah. SMP Negeri 1 Sekadau Hilir unggul dalam hal sarana prasarana, termasuk laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan fungsional, dan sarana olahraga yang memadai. Secara visual maupun fungsional, fasilitas ini memberikan citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir menghadapi keterbatasan fasilitas yang secara tidak langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian Lestari & Kusumawardani (2021) serta Arifin & Nurdin (2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan fasilitas antar sekolah menjadi penyebab utama zonasi gagal mewujudkan pemerataan. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan kualitas fasilitas dan rekam jejak sekolah dibanding kedekatan geografis ketika memilih sekolah untuk anak mereka. Dalam konteks Kabupaten Sekadau, faktor ini tampak jelas: sekolah yang berada di pusat kota tetap menjadi prioritas meskipun kebijakan zonasi mengatur sebaliknya.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana di kedua sekolah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. SMP Negeri 1 mengoptimalkan pelayanan dengan memperpanjang jam layanan pendaftaran dan menyediakan informasi yang responsif bagi masyarakat. SMP Negeri 10 menunjukkan komitmen serupa melalui strategi jemput bola ke desa-desa, sebuah tindakan yang membutuhkan energi dan waktu lebih besar dibandingkan sekolah di pusat kota. Kedua pendekatan ini menunjukkan tingginya dedikasi pelaksana terhadap kebijakan. Namun demikian, penelitian Prasetyo (2022) mengungkap bahwa komitmen pelaksana—betapapun kuatnya—tidak selalu mampu mengatasi persepsi publik mengenai kualitas sekolah. Temuan tersebut relevan dengan kondisi SMP Negeri 10 yang meskipun dikelola oleh pelaksana yang berkomitmen tinggi, tetap kurang diminati masyarakat karena persepsi fasilitas dan kualitas akademik yang belum sekuat SMP Negeri 1. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana harus didukung oleh peningkatan sumber daya agar berdampak signifikan.

Struktur Birokrasi

Dari perspektif birokrasi, kedua sekolah telah menjalankan PPDB sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, yang menekankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Struktur panitia PPDB sudah disusun dengan SK Kepala Sekolah, alur pelayanan sudah ditetapkan, dan prosedur verifikasi dokumen sudah dijalankan. Meskipun demikian, struktur birokrasi SMP Negeri 1 lebih kompleks dan lengkap karena menyesuaikan jumlah pendaftar yang lebih besar. Struktur birokrasi SMP Negeri 10 lebih sederhana tetapi cukup fleksibel, sebuah keuntungan untuk menyesuaikan pelayanan dengan kondisi geografis yang menantang. Setiawan (2020) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dapat meminimalkan kesalahan prosedur dan mempercepat alur layanan. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, namun juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi bukanlah satu-satunya faktor kesuksesan implementasi. Tanpa dukungan fasilitas dan persepsi publik yang positif, struktur birokrasi tidak dapat berdiri sebagai pilar efektifitas implementasi

Hambatan

Hambatan terbesar dalam implementasi zonasi terjadi pada faktor geografis. SMP Negeri 10 berada di lokasi yang lebih jauh dari pusat kota dan akses jalan yang belum memadai. Pada musim hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui, membuat orang tua enggan memilih sekolah tersebut. Kondisi ini relevan dengan temuan Wulandari (2022) serta Lazuardi (2024), yang menegaskan bahwa topografi dan infrastruktur menjadi hambatan utama pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan. Hambatan geografis ini menunjukkan bahwa penerapan zonasi belum mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur di tingkat lokal. Dengan demikian, pemerataan pendidikan tidak dapat dicapai jika faktor fasilitas dasar seperti akses jalan tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan zonasi PPDB. Mengintegrasikan keempat variabel Edwards III dengan temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi zonasi bergantung pada keseimbangan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dikategorikan baik pada kedua sekolah. Namun faktor eksternal seperti persepsi masyarakat, ketimpangan sarana-prasarana, dan aksesibilitas menjadi penentu utama perbedaan hasil implementasi. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa teori implementasi kebijakan tidak hanya dapat diterapkan secara mekanis, tetapi harus diperluas dengan analisis konteks sosial dan geografis sebagaimana ditunjukkan penelitian Lazuardi (2024). Jika dibandingkan secara langsung, SMP Negeri 1 memiliki keunggulan komunikasi digital, fasilitas lebih memadai, akses geografis lebih baik, serta beban kerja panitia yang tertata dengan struktur lebih lengkap. Sementara itu, SMP Negeri 10 unggul dalam aspek kedekatan sosial dengan masyarakat desa serta pelayanan personal yang lebih intens. Namun, keunggulan personal tersebut tidak cukup kuat untuk mengimbangi kerugian struktural yang dihadapi sekolah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sekolah di pusat kota cenderung lebih diuntungkan dalam implementasi zonasi, sebuah fenomena yang juga ditemukan oleh Yusuf & Handoko (2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada SMP Negeri 1 Sekadau Hilir dan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir Tahun Ajaran 2024/2025 belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan peserta didik baru. Ketimpangan tersebut dapat dijelaskan melalui empat variabel dalam model implementasi George C. Edwards III. Dari aspek komunikasi, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir menerapkan strategi komunikasi publik yang lebih intensif melalui pemanfaatan media sosial, spanduk, dan pertemuan orang tua sehingga informasi zonasi tersampaikan secara luas. Sebaliknya, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir belum memaksimalkan publikasi sehingga jangkauan informasi kebijakan masih terbatas. Dari aspek sumber daya, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir tetap diminati masyarakat meskipun memiliki banyak ruang kelas rusak karena reputasi dan manajemen sekolah yang kuat. Sementara itu, SMP Negeri 10 Sekadau Hilir memiliki fasilitas fisik lebih baik namun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta belum mengoptimalkan modal reputasi dan citra institusional. Pada aspek disposisi, kedua sekolah sama-sama berkomitmen melaksanakan kebijakan zonasi, tetapi implementor di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir menunjukkan sikap yang lebih proaktif dan inovatif dibandingkan implementor di SMP Negeri 10 Sekadau Hilir yang cenderung pasif. Dari aspek struktur birokrasi, SMP Negeri 1 Sekadau Hilir memiliki struktur kepanitiaan PPDB yang lebih lengkap, termasuk fungsi promosi, sedangkan SMP Negeri 10 Sekadau Hilir memiliki struktur yang lebih

sederhana tanpa unit khusus untuk publikasi. Selain itu, pembagian wilayah zonasi pada tingkat kebijakan belum mempertimbangkan variasi kepadatan penduduk secara proporsional. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan zonasi di Kabupaten Sekadau sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi publik, kecukupan dan pemanfaatan sumber daya, disposisi pelaksana, serta kapasitas struktur birokrasi dalam mendukung proses PPDB secara berkeadilan.

Saran

1. Sekolah dengan tingkat peminatan yang masih rendah, seperti SMP Negeri 10 Sekadau Hilir, perlu memperkuat strategi komunikasi publik melalui pemanfaatan media digital, publikasi capaian dan prestasi sekolah, serta pelibatan tokoh masyarakat untuk memperluas penyebaran informasi mengenai PPDB dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah perlu dioptimalkan disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, program pengembangan kompetensi guru, serta dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk kegiatan promosi dan pengembangan program-program sekolah.
3. Pelaksana kebijakan di lingkungan sekolah perlu didorong untuk memiliki disposisi yang lebih proaktif dan inovatif, baik dalam menyosialisasikan PPDB maupun dalam mengembangkan program unggulan yang dapat meningkatkan daya tarik sekolah dan mendorong pemerataan pilihan peserta didik.
4. Struktur kepanitiaan PPDB di sekolah yang peminatnya rendah perlu diperkuat dengan menambahkan fungsi promosi serta memastikan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Pendidikan. Koordinasi ini diperlukan untuk evaluasi pembagian zonasi secara berkala berdasarkan data kepadatan penduduk sehingga pelaksanaan kebijakan zonasi dapat berlangsung lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2017). *Konsep dan Implementasi Kebijakan Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Diterjemahkan oleh Dodi Faedlulloh. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politik dan Implementasi Kebijakan di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press
- Kurniawati, S. (2021). *Manajemen Pendidikan dan Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugraha, A. (2020). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama". Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, Vol. 14, No. 2, hal. 77–90.
- Tilaar, H.A.R. (2009). "Kebijakan Pendidikan: Kajian Teori dan Praktik". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, hlm. 445–488.
- Fitriani, D., & Nurhadi. (2020). "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di Indonesia". Dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 45–58.
- Putri, A. (2021). "Zonasi Pendidikan dan Pemerataan Akses Sekolah". Dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 55–70.
- Rahman, F. (2022). "Pemerataan Akses Pendidikan melalui Sistem Zonasi". Dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 11, No. 2, hlm. 133–146.
- Sari, I. P. (2021). "Analisis Implementasi Sistem Zonasi PPDB pada Tingkat SMP". Dalam *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 98–110.
- Yuliani, T. (2020). "Tantangan Implementasi Sistem Zonasi di Daerah Terpencil". Dalam *Jurnal Pendidikan Daerah*, Vol. 6, No. 3, hlm. 201–215
- Kemendikbud. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- SMP Negeri 10 Sekadau Hilir. (2024). "Laporan Hasil PPDB Tahun Ajaran 2024/2025". Sekadau: SMP Negeri 10 Sekadau Hilir.
- SMP Negeri 1 Sekadau Hilir. (2024). "Laporan Hasil PPDB Tahun Ajaran 2024/2025". Sekadau: SMP Negeri 1 Sekadau Hilir.